

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP). Sebagai penerimaan negara, pajak digunakan untuk mendanai aktifitas belanja modal dan operasional pemerintahan dalam bentuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan jasa publik. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang. Hingga saat ini, penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,

untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang di berikan oleh suatu penduduk daerah kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan umum suatu daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

f. Pajak Parkir

g. Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan jenis Pajak Daerah diatas, yang menjadi pembahasan adalah Pajak Parkir. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dalam pelaksanaan Pajak parkir, pemerintah daerah dituntut untuk turut mengawasi proses pelaksanaan Pajak Parkir. Oleh karena itu, petugas pengawas Pajak Parkir harus meningkatkan kinerjanya, sehingga mampu mengatasi masalah yang timbul. Untuk mengelola Pajak Parkir ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah, karena itu mahasiswa perlu mengetahui lebih dalam tentang kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Keuangan dan Pajak Daerah di Kota Surabaya. Hal inilah yang menjadikan penulis untuk membahas permasalahan dan kontribusinya sebagai laporan tugas akhir dengan judul **KONTRIBUSI PAJAK PARKIR BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA.**

1.2 TUJUAN STUDI LAPANG

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak parkir diwilayah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak parkir Kota Surabaya.

3. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

1.3 MANFAAT STUDI LAPANG

Manfaat studi lapang:

1. Bagi Penulis

Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari seperti permasalahan yang timbul selama Praktik Studi Lapang, untuk memperluas wawasan penulis dan menerapkan ilmunya dibidang perpajakan, serta menguji dan mengukur kemampuan penulis dalam menghadapi situasi dunia kerja.

Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai referensi serta dapat dijadikan pertimbangan untuk kegiatan sejenis.

2. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Dapat menjalin kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

3. Bagi Stiesia

Sebagai informasi tambahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil laporan ini.

1.4 RUANG LINGKUP STUDI LAPANG

Ruang lingkup penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membahas hasil penelitian pada permasalahan yang mencakup pada sistem perpajakan khususnya dalam sektor Pajak Parkir, mengetahui mekanisme pemungutan pajak parkir, juga kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir di Kota Surabaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teknik Observasi

Kegiatan mencari data secara langsung maupun tidak langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati secara sistematis atas obyek yang diteliti.

2. Teknik Wawancara

Kegiatan pengumpulan data dengan cara percakapan yang dilakukan langsung kepada pihak yang berkompeten dibidangnya, dan pihak lain yang memiliki pengetahuan yang sama dengan obyek penelitian.

3. Teknik Dokumentasi

Pengolahan data dengan cara meminta data dari laporan dan catatan milik BPKPD yang erat hubungannya dengan penelitian ini.